

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Azizah, N., *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2022.
- Asser, Mr. C., *Verbintenissenrecht*, Tjeenk Wilink, Zwolle, De Verbintenissen in het algemeen, 1978.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Esther Masri, *Modul Mata Kuliah Hukum Perikatan*, 2021.
- Epstein, David G., Steve H., James J. White, *Bankruptcy*, St. Paul, Minn: West Publishing CO, 1993.
- French Dictionary (6 Edition)*, HarperCollins Publisher, Paris, 2001.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Efek Sebagai Benda*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Buku perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, jakarta, 2011.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas benda jaminan apabila debitur pailit*, LaksBank Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Ishak, *Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, 2015.
- J. Satrio, S. H, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I (2nd ed.)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- J.B. Hulzink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Juli Irmayanto, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000.
- Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

- Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan dalam Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Landowero Stelanova P, *Penerapan Prinsip asas Keadilan kepada Kreditur Konkuren yang memiliki hak tagih lebih besar dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2013.
- Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Prinsip dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M.A. Tair, dan H. Van Der Tas, *Kamus Belanda, Timun mas*, Jakarta, 1957.
- Michael Murray dan Jasson Harris, *Keay's Insolvency (Personal and Corporate Law and Principle)*, Thompson Reuters (Professional), Australian Limited, Pyrmont, NSW, 2014.
- Nurwakhid, *Buku Bahan Ajar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2020.
- Pitlo, A, *Het System Van Het Nederlandse Privaat-Recht*, Tjeenk-Willink, Groningen, 1971.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2005.
- Prof Mahadi, S.H., *Buku Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenadamedia group, Jakarta, 2016.
- Rohman, H., Purwanto, M. A., Praya, S. N., Agrifernando, N., & Putri, D. Y., *Transformasi Pegadaian Menuju Sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) (1st ed.)*, PT Pegadaian: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, Jakarta, 2021.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Buku BAB-BAB tentang Hukum Benda*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2020.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/ Swasta*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Sejarah Asas dan Prinsip Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2016.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cet. 4. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2021.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Apabila Debitur Pailit*. Pailit. Yogyakarta: LaksBank Pressindo, 2011.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Sri Mamudji, *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sosiawan, U. M., & Ulang, D, *Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Studi Hukum dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU No 37 tahun 2004)*, Balibang Hukum dan HAM kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, CV Pang Linge, Jakarta, 2017.
- Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Wignojosumarto, Parwoto. *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/ Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/ Pengurus*. Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019
- Zainal Asikin, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*”. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya. 1990.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).
- Staatsblad* tentang *Faillissement Verordening*, *Staatsblad* 1906 Nomor 348;
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2025 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*;
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*;
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang *Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan*;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang *Pergadaian*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek*;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang *Pemberlakuan Buku Pedoman Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740.
- Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, SKMA Nomor 30/[KMA.SK/IV/2020](#) Tahun 2020.
- Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 tahun 2004, LN. No. 9 Tahun 2004, TLN. No. 4359.

### Jurnal Ilmiah

- Abbas, Ilham, Salle Salle dan Hardianto Djanggih. “*Corporate Responsibility Towards Employees’ Welfare: Case Study PT Semeru Ratu Jaya Makassar.*” *Yuridika*. Vol. 34. No 1 (2019). Hlm. 37-52.
- Akyas, Mohamad. “*Eksekusi Lelang oleh Kreditur Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU dalam Kajian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.*” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2(2022), hlm. 303-315.
- Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi. “*Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 28. No. 3 (2021).
- Arijna Nur Sofia, Kedudukan Hak Suara Kreditur preferen dalam persetujuan rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), *Jurist-Diction* Vol. 3 No. 4, 2020.
- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Asas Integrasi dalam Undang-undang kepailitan vs Cita-cita kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Damlah, Judita, Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex Crimen* Vol. 6, VI, No. 2, 2017.
- Erry Fitrya Primadhany, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan Graha Dewata Akibat Dipailitkannya Pengembang PT Dewata Abdi Nusa (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby), *Arena Hukum*, Vol.7, No. 2, 2014.
- Emy Rosnawati, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, *Holrev*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Febri Yanti Casanova, Lindari Dwiatin, dan Dianne Eka R, Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya

- pengecegah terjadinya kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst), *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Ilham Abbas, Salle Salle dan Hardianto Djanggih, *Corporate Responsibility Towards Employees Welfare: Case Study PT Semeru Ratu Jaya Makassar*, *Yuridika*, Vol. 34, No. 1, 2019.
- I Nyoman Mangku Suryana, Pembatasan Terhadap Asas Freis Ermessen, *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No.2, 2018.
- Ilham abbas, salle salle dan hardianto djanggih, *Corporate Responsibility Towards Employees Welfare: Case Study PT Semeru Ratu Jaya Makassar*, *Yuridika*, Vol. 34, No. 1, 2019.
- Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, Analisis terhadap perdamaian dalam PKPU dan pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan tnjonja meneer, *Ntarius*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Fitria, Anisa “*Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas perbuatan action paulana yang dilakukan oleh debitor pailit.*” *Lex Jurnalica*. Vol. 17. No. 1 (2020).
- Faisal, Pupung. “*Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure dalam Proses Kepailitan.*” *Jhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 2. No. 1 (2016).
- Hindrawan P, Sunarmi, Ginting Budiman, dan Harianto D, Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, 2023.
- Hariyanto, Erie, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia).*” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 4, No.1, 2013.
- Henry Anto Simanjuntak, Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditur, *Jurnal Justiqqa*, Vol. 02, 2020.
- Kamahayani, M., dan Margono, S., Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, No. 1, 2020.
- Muhammad Karim dan M. Adli Abdullah, Tinjauan Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Kebendaan *Juridical Review of Shares as Object of Material Guarantee*, *JIM, Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No.1, 2019.
- Negara P Cakra, Antoine Annisa, Marpaung Evi M, Cristine Purba, dan Munthe Yuliana, Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang yang Terutang, *Diponegoro Private Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Nanda Chandra Pratama Negara, Perlindungan Hukum Debitur atas Terpenuhinya *concursum creditorium* dalam permohonan pailit sebagai akibat *cessie* atas sebagian jumlah piutang, *Jurnal Economic & Business Law Reciew*, Vol. 1 No.2, 2021.
- Prawira, F., Setiawan, N., dan Mantiri, J. C., Hukum Perikatan (Putusan MA Nomor 951 K/Pdt/2015), *QISTINA, Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2023.

- Ri Mantili, *Proses Kepailitan oleh Debitur sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam hal terjadi Kepailitan terhadap Debitur*, Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Siti mahmudah, *Kedudukan Lessor dalam perjanjian operasional leasing terhadap kepailitan lessee di Indonesia*, Diponegoro private law review, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum UGM, Vol.14, No.2, 2014.
- Yane Pakel, *Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harga Pailit*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 3, No.1, 2018.

### **Laporan, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi**

- Adlan Adonis, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Proses Kepailitan di Indonesia*, Thesis, Universitas Indonesia, 2003.
- Sekar Ayu Mawaddah, *Analisis Penerapan Hukum Terkait Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby (Studi Kasus PT Teknik Utama Mandiri)*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2022.
- Himarasmi Jyesthaputri A, *Implementasi Kepastian dan Perlindungan Hukum Para Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus No. 373/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2023.

### **Media Online**

- Willa Wahyuni, *“Tujuan dan Proses PKPU”*. Hukum Online, 12 Mei 2022, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>, diakses pada 24 Agustus 2025.
- Mahkamah Agung, 11 Juli 2025, *Burgerlijk Wetboek sejarah KUHPerdata*, tersedia pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/burgerlijke-wetboek-sejarah-kuh-perdata-warisan-belanda-0oA>, diakses tanggal 12 November 2025.
- SIP Law Firm, *Hukum Perikatan*, 19 Agustus 2024, tersedia pada <https://siplawfirm.id/hukum-perikatan/?lang=id>, diakses tanggal 12 November 2025.
- Law Cornell, *Definition Security*, tersedia pada [https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def\\_id=15-USC-949122880-452767500&term\\_occur=5&term\\_src=](https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-949122880-452767500&term_occur=5&term_src=) diakses pada 28 November 2025.
- Pegadaian, *Produk Gadai Efek*, tersedia pada <https://pegadaian.co.id/produk/gadai-efek>, diakses pada tanggal 28 November 2025.

Jerome Segard, *Bankruptcy law, Majority Rule, and Private Ordering in England and French (Seventeenth-Nineteenth Century)*, tersedia pada <http://www.oxpo/politics.ox.ac.uk>, Diakses pada 30 November 2025.

Rizky Dwinanto dalam Hukum Online, 2 syarat putusan PKPU bisa diajukan kasasi hukumonline, 3 juni 2022, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/>, diakses pada 13 desember 2025.

